

Alun-alun Pamulang Tangsel Mulai Beroperasi Bulan Depan

PAMULANG (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengatakan telah merampungkan pembangunan alun-alun Pamulang di Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangsel, Banten. Dalam waktu dekat, fasilitas ruang terbuka tersebut akan mulai dioperasikan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Alun-alun Pamulang pengerjaannya sudah selesai. Pembangunan alun-alun 100 persen dan akan diserahkan ke DLH (Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel) selaku yang punya aset, paling telat pada Februari 2023. Kalau sudah diserahkan, baru akan dibuka,” kata Kepala Bidang Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangsel, Ihtiyah Hermansyah, di Tangsel, kemarin.

Ihtiyah mengatakan, pembangunan alun-alun Pamulang yang berlokasi persis di depan Kantor Kecamatan Pamulang dan Masjid Agung Pamulang itu dikerjakan selama sekitar enam bulan. Kawasan alun-alun seluas 5.800 meter persegi tersebut dihadirkan untuk menyajikan ruang publik baru bagi masyarakat Tangsel, khususnya warga Pamulang.

“Tujuannya dibangun alun-alun ini memang di Tangsel butuh tempat untuk masyarakat bersosialisasi atau berkumpul bersama. Konsepnya industrialis, ada berbagai macam fasilitas di alun-alun Pamulang seperti jogging track, permainan anak, dan ikon-nya ada air mancur yang menyalakan nantinya,” tuturnya.

Pembangunan alun-alun Pamulang diketahui dilakukan di lapangan atau lahan kosong yang dianggap perlu untuk digarap dan dimanfaatkan. Pembangunan sarana dan prasarana atau fasilitas untuk kegiatan di alun-alun tersebut berkapasitas sekitar 70 persen, sementara 30 persennya yakni penghijauan.

Selain menyediakan fasilitas olahraga dan permainan anak serta hiburan air mancur, alun-alun Pamulang juga didesain ramah disabilitas. Disediakan fasilitas seperti ram untuk kalangan disabilitas yang membutuhkan kursi roda, serta toilet khusus bagi kalangan tersebut. “Anggaran pembangunan alun-alun Pamulang itu Rp9.025.000.000,” ucap Ihtiyah. ● **pp**

Program Gebrak Pakumis Wujudkan 1.222 Rumah Layak Huni Selama 2022

TANGERANG (IM)- Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat prasejahtera di Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga melalui program Gebrak Pakumis. Gebrak Pakumis adalah singkatan dari Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin.

Selama 2022, Pemkab mencatat sebanyak 1.222 unit rumah diperbaiki menjadi rumah layak huni di Kabupaten Tangerang. “Di tahun 2022, ada 1.222 rumah yang sudah kami berikan bantuan lewat program Gebrak Pakumis,” kata Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman Kabupaten Tangerang, Bambang Saptho Nurtjahja, Kamis (12/1).

Pemkab Tangerang telah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp30 miliar untuk 1.000 unit rumah pada 2022.

Selain itu, melalui bantuan perbaikan ini, kata Bambang, penerima bantuan mendapatkan pelayanan perumahan yang layak huni dan kualitas hidup lebih sejahtera. “Untuk stimulan masing-masing rumah itu sebesar Rp25 juta,” ujarnya.

Pada 2023, Bambang menyatakan bahwa Pemkab Tangerang menargetkan sebanyak 1.000 lagi untuk mendapatkan program serupa. “Tahun 2023 ini kami juga menargetkan untuk memperbaiki sebanyak 1.000 lagi,” ucapnya.

Sebagai informasi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, Pemkab Tangerang menargetkan sebanyak 5.000 mendapatkan program Gebrak Pakumis. Sebanyak 4.444 rumah telah terbangun dari tahun 2019-2022. ● **pp**

Dugaan Kasus Korupsi BPBD Kota Tangerang Masuk Babak Baru



Gedung Kejar Kota Tangerang.

TANGERANG (IM)- Dugaan kasus tindak pidana korupsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, memasuki babak baru.

Salah seorang staf bidang Pidana Khusus Kejar Kota Tangerang yang tidak mau disebutkan namanya saat ditemui International Media, Kamis (12/1) mengatakan berkas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang, Jumat, (6/1).

Para pegiat antikorupsi itu melaporkan pejabat BPBD di kota Akhlakul Karimah, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) Tahun Anggaran 2022.

Sekretaris Jenderal BIAK, Ushrah mengatakan, laporan dilayangkan setelah sejumlah upaya telah dilakukan ke BPBD Kota Tangerang. Mulai dari klarifikasi hingga somasi, untuk mendapatkan jawaban dari pemangku kebijakan di BPBD Kota Tangerang atas dugaan penyelewengan anggaran daerah tersebut.

Menurut Ushrah, pihaknya menemukan ada indikasi dugaan manipulasi data laporan pertanggungjawaban pekerjaan pada pengadaan mobil Damkar Tahun 2022 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 4.833.270.000,00, yang dikerjakan oleh CV. Protekta Logistik yang beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Harga penawaran tersebut sebesar Rp4.560.351.000. Penawaran itu untuk 3 unit pengadaan mobil Damkar dengan Kapasitas 3000 liter (double cabin).

“Kami menemukan adanya dugaan manipulasi laporan serah terima akhir pekerjaan (FHO) yang seolah-olah pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi atau pun RAB serta kontrak, sedangkan berdasarkan hasil temuan Investigasi kami di lapangan bahwa mobil pemadam kebakaran yang dikerjakan CV. Protekta Logistik adalah mobil Damkar kapasitas 3000 liter air plus 300 liter foam (3300) (single cabin) Hino, sedangkan spesifikasi pengadaan yang ditentukan yaitu pengadaan mobil Damkar kapasitas 3000 Liter (double cabin),” ujar Ushrah. ● **joh**



PEDAGANG POHON JERUK UNTUK IMLEK

Pedagang mengangkat pohon jeruk Kim Kit di Karang Tengah Ciledug, Tangerang, Banten, Kamis (12/1). Pohon jeruk Kim Kit asal Guangzhou, Tiongkok ini banyak dijual pedagang menjelang perayaan Imlek yang diyakini masyarakat Thionghoa sebagai lambang keberuntungan.

Soal PHK Massal, Disnakertrans Diminta Berkoordinasi dengan Kabupaten Kota

Apabila memang pilihannya tidak ada opsi lain selain harus PHK, maka diimbau ada pendampingan kepada masyarakat yang terdampak agar hak-hak para tenaga kerja bisa diperoleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

SERANG (IM)- Komisi V DPRD Provinsi Banten meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Koordinasi itu dilakukan untuk melakukan komunikasi kembali kepada perusahaan yang telah mengumumkan hal tersebut guna mencari jalan keluar atau solusi terbaik untuk menghindari PHK.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa mengatakan, mungkin ada hal yang perlu didiskusikan bersama. “Sehingga menjadikan PHK sebagai alternatif terakhir apabila tidak ada jalan keluar,” ujar Yeremia, Kamis (12/1).

Pihaknya mengaku sangat prihatin dengan hal itu. Apalagi saat ini, Pemprov Banten sedang giat untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten.

“Baik dalam hal terus meningkatkan investasi di Banten, terus menjaga kondisitas perekonomian dan pemerintahan di Provinsi Banten,” tuturnya.

Di sisi lain, politikus PDIP ini mengatakan, dalam situasi ekonomi global, saat ini juga telah memasuki tahapan resesi. Untuk itu, harus ada persiapan dari dalam negeri. “Keadaan ini rupanya sudah masuk ke Provinsi Banten,” ujar Yeremia.

Untuk itu, ia meminta Pemprov Banten dalam hal ini Disnakertrans Provinsi Banten berkoordinasi dengan

Disnakertrans kabupaten/kota untuk melakukan komunikasi kembali kepada perusahaan yang telah mengumumkan hal tersebut supaya dicari jalan keluar.

“Oleh karena itu, kami juga mengimbau kepada Disnakertrans kabupaten/kota untuk bersinergi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan perusahaan tersebut,” tegasnya.

Apabila memang pilihannya tidak ada opsi lain selain harus PHK, maka pihaknya mengimbau agar ada pendampingan kepada masyarakat yang terdampak agar hak-hak para tenaga kerja bisa diperoleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian setelah para pekerja mendapat haknya, Yeremia berharap bisa digunakan secara produktif. “Jangan sampai dibuat sebagai konsumtif, sehingga bisa menambah income keluarga,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, produktivitas dunia tenaga kerja di Banten dan investasi yang khususnya untuk padat modal harus dijaga. Semua pihak juga harus terus mengurangi dampak terburuk dari resiko resesi dunia yang

sudah di depan mata dan sudah mulai berefek ke Banten, terutama perusahaan yang orientasi ekspor.

Terpisah, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengatakan, kewenangan urusan PHK yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah kewenangan Disnakertrans kabupaten/kota. “Kalau PHK sesuai kewenangannya Disnaker Kabupaten Serang,” ujarnya melalui pesan singkat di aplikasi Whatsapp.

Bupati Serang Bangun Komunikasi

PHK massal dan penawaran pengunduran diri karyawan secara sukarela seperti di PT Nikomas Gemilang menjadi PR besar bagi pemerintah daerah.

Menyikapi hal itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, hal ini terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia, di mana jumlah ekspor industri tekstil tengah drop.

“Kami akan bangun komunikasi dengan Pemprov Banten untuk mencari solusi bagi karyawan yang terkena gelombang PHK besar-besaran ini,” kata Tatu usai membuka Grand Launching Festival kebudayaan Tanara,

Kamis (12/1).

Dijelaskan Tatu, gelombang PHK yang saat ini terjadi merupakan dampak pascapandemi covid-19 yang dikhawatirkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. “Bagaimana pun juga, pemerintah daerah harus mencari solusi terbaik bagi karyawan yang di PHK ini, karena mereka memiliki keluarga yang harus terus dinafkahi,” jelasnya.

Diungkapkan Tatu, sejak awal Pandemi, pihaknya sudah memberikan penegasan kepada semua industri agar apapun yang terjadi jangan sampai ada kebijakan mem-PHK karyawan.

“Tapi mungkin ini sudah pilihan terakhir bagi pihak perusahaan karena tidak sanggup lagi bertahan,” ungkapnya.

Terkait mekanisme pengunduran diri karyawan secara sukarela dan PHK, Tatu berjanji akan terus mengawal proses pemenuhan hak-hak karyawan yang terdampak.

“Kami melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus mengawal dan koordinasi dengan perusahaan,” pungkaskannya. ● **pra**

Disnakertrans Larang Perusahaan di Lebak Lakukan PHK Massal

LEBAK (IM)- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lebak melarang perusahaan di Kabupaten Lebak untuk melakukan Pemutusan Hak Kerja (PHK) massal. Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Disnakertrans Lebak, Maman Suparman.

Katanya, PHK massal tentunya akan berdampak buruk bagi perekonomian khususnya para kaum buruh. “Jangan sampai ada PHK massal di Lebak. Saya tidak mau dengar itu,” katanya, Kamis (12/1).

Maman mengatakan, PHK massal akan menimbulkan peningkatan pengangguran yang ujungnya akan berdampak pada perekonomian. Terlebih, tingkat pengangguran di Bumi Multatuli ini sudah tergolong tinggi. “Tingkat pengangguran kita itu saat ini cukup tinggi yaitu tujuh persen dari total warga Lebak. Jika ada perusahaan yang melakukan PHK massal otomatis akan membuat tingkat pengangguran bertambah,” ujarnya.

Dibandingkan melakukan PHK massal, Maman menyarankan kepada pihak manajemen perusahaan yang ada di Lebak untuk melakukan efisiensi jam kerja kepada para karyawannya. Salah satunya dengan membagi jam kerja karyawan secara terjadwal.

“Memang ada beberapa perusahaan yang saat ini orderannya berkurang, dan bahkan

kemarin ada perusahaan yang mau merumahkan 200 karyawannya. Cuma saya bilang jangan, lebih baik diatur lagi jam kerjanya. Alhamdulillah sekarang ke 200 karyawan itu masih bekerja,” ucapnya.

“Dan sampai sekarang kita belum terima laporan ada perusahaan yang lakukan PHK massal,” tambahnya.

Ia menegaskan, jika setiap management perusahaan jika hendak melakukan PHK walaupun hanya satu orang, maka perusahaan itu harus melaporkannya kepada pihak Disnakertrans Lebak. “Perusahaan wajib lapor mau PHK ataupun penambahan karyawan, kita ingin lihat berapa laju penyerapan tenaga kerja di kita,” tegasnya.

Maman memaparkan, Disnakertrans Lebak sendiri mempunyai posko layanan khusus yang melayani setiap aduan karyawan atau buruh. Ia pun meminta kepada para buruh mengadu ke posko itu jika mengalami ketidakadilan di lingkungan kerja seperti PHK sepihak dan lain-lainnya.

“Di kita itu ada bidang hubungan industrial yang menampung terkait berbagai keluhan karyawan. Jika karyawan cape atau mengalami ketidakadilan di lingkungan kerja bisa mengadu kepada kami. Karena pada dasarnya Disnakertrans Lebak merupakan orang tua para karyawan di Lebak,” pungkaskannya. ● **pra**

Pemkot Tangerang Tambah Posko Pantau Sampah di Ciledug

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota Tangerang kembali mendirikan posko pantau sampah di Jalan Raden Patah, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, Banten. Posko pantau sampah yang kedua ini didirikan di seberang Perumahan Griya Ciledug dan mulai dijaga sejak Selasa (10/1).

Sebelumnya, posko pantau sampah pertama didirikan pekan lalu, tepatnya Kamis (5/1) di samping jembatan Kali Parung Serab.

Posko pertama didirikan di samping jembatan Kali Parung Serab itu karena menjadi lokasi yang paling banyak deretan sampah di tengah jalan raya. “Kemarin posko ini dipasang, karena masyarakat tahu di ujung (lokasi posko pantau sampah pertama) ada yang jaga, mereka buang sampahnya di sini (menunjuk ke tengah jalan raya di depannya itu),” ujar Neman, anggota Seksi Keterteraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Ciledug saat dijumpai di posko pantau sampah, Rabu (11/1) malam. Sama halnya dengan mekanisme penjagaan di posko pantau sampah yang pertama, tim yang berjaga di posko kedua ini juga merupakan gabungan dari trantib, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Mereka bertugas dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB. Tugas yang dilakukan juga sama, yakni menindak dengan menyita kartu tanda penduduk (KTP) para pelaku pembuangan sampah sembarangan di tengah jalan raya itu.

Menurut Neman, pelaku pembuangan sampah sembarangan itu terlalu banyak taktiknya. Mereka sengaja menghindari daerah yang dijaga petugas dan membuang sampah di tempat lain. “Iya kemarin, di posko sana sudah bersih, mereka malah buang sampah di sini (depan posko kedua),” ujar dia.

“Ya masalah sampah ini sampai kapan pun enggak bakal beres sih, toh masyarakat sampai meninggal sekalipun tetap buang sampah. Tapi ya itu balik lagi ke kesadaran masyarakatnya juga, toh enggak mungkin mau dijagain terus-menerus kan ya,” tambah dia.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Neman, berdasarkan pantauan di lapangan, ada beberapa titik di sepanjang Jalan Raden Patah Ciledug yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat.

Pada Minggu (9/1), saat para petugas penjaga posko pantau sampah itu sudah pulang, ternyata ada kantong plastik berwarna merah yang dilempar di lokasi tersebut

pada pukul 01.16 WIB. Kantong plastik merah itu tepat berada di dekat tulisan larangan dari pemerintah untuk tidak membuang sampah di lokasi itu.

Kantong sampah berwarna merah itu berisikan sampah-sampah rumah tangga. Ada kertas berwarna coklat yang biasa digunakan untuk membungkus makanan, sisa-sisa makanan seperti nasi dan lauknya, kantong-kantong plastik yang lebih kecil dari plastik merah dan lain sebagainya. Padahal, satu jam sebelumnya, sepanjang 300 meter di lokasi itu steril dari sampah.

Akan tetapi, Jalan Raden Patah Kecamatan Ciledug itu cukup panjang. Ada sekitar 1-2 kilometer jalannya masih terlihat sampah di tengah jalan. Tepatnya di depan area Pasar Lembang, Kecamatan Ciledug terlihat masih banyak jejeran sampah di sana.

Tidak hanya itu, di jalan Hos Cokroaminoto yang menjadi salah satu dari dua lokasi yang disorot beberapa waktu lalu juga masih terlihat tumpukan sampah.

Untuk itu, selain menambah pos pantau sampah, pemerintah daerah juga menambah plang larangan membuang sampah sembarangan di sepanjang Jalan Raden Patah. ● **pp**